

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, pemanasan global merupakan tantangan lingkungan yang sangat krusial dan mendapat perhatian luas di seluruh dunia. Fenomena ini semakin mengemuka seiring meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang terus mencetak rekor baru dan memicu perubahan iklim serta cuaca ekstrem di berbagai wilayah. Secara alami, suhu Bumi dipengaruhi oleh keberadaan gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang berperan dalam menahan radiasi panas matahari untuk menjaga kestabilan suhu permukaan Bumi (BMKG, 2025). Peningkatan suhu global disebabkan oleh faktor alami dan aktivitas manusia, dengan kontribusi terbesar berasal dari aktivitas manusia yang memicu akumulasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O) di atmosfer (Karunia & Rizkyana, 2026).

Seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca tersebut, dampak yang ditimbulkan kini semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, yang ditandai dengan meningkatnya suhu ekstrem, frekuensi bencana alam yang lebih tinggi, terganggunya ketersediaan pangan, kenaikan permukaan laut, meningkatnya risiko kepunahan flora dan fauna, serta ancaman terhadap kesehatan manusia (Sutomo dkk., 2025). Karbon dioksida (CO₂) merupakan kontributor terbesar terhadap pemanasan global. *World Meteorological Organization* (WMO) dalam laporannya menunjukkan bahwa konsentrasi CO₂ di atmosfer terus mengalami peningkatan dan mencapai 423,9 ppm pada tahun

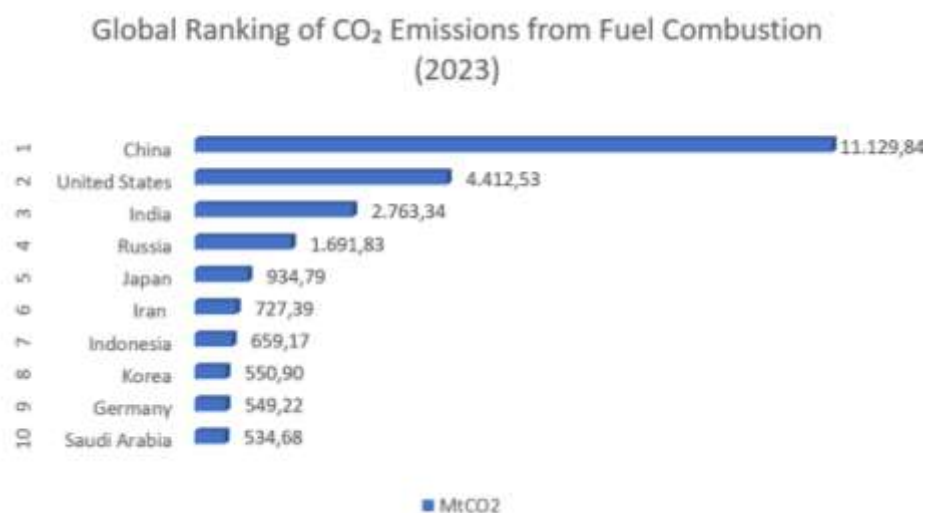
2024, dengan kenaikan tahunan sebesar 3,5 ppm yang merupakan peningkatan tertinggi yang pernah tercatat.

Indonesia tercatat sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar ke-6 di dunia pada tahun 2024. Menurut laporan dari *Joint Research Centre* (JRC) Komisi Eropa, Indonesia memiliki total emisi sekitar 1,3 miliar ton CO₂ ekuivalen atau sekitar 2,5% dari total emisi global yang mencapai sekitar 53,2 miliar ton (Joint Research Center, 2025). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan kontribusi emisi yang cukup besar di tingkat global.

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang menghasilkan emisi dalam jumlah besar ke lingkungan. Emisi tersebut berasal dari berbagai sektor, seperti pembangkitan listrik, industri, transportasi, bangunan, pertanian, limbah, dan eksploitasi bahan bakar, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap akumulasi gas rumah kaca di atmosfer (Joint Research Center, 2025). Dari berbagai sumber tersebut, pembakaran bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebab utama peningkatan emisi karbon, yang kemudian diperparah oleh kebakaran hutan serta menurunnya kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon (World Meteorological Organization, 2025). Akibatnya, sektor energi menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar secara global.

Sejalan dengan hal tersebut, *International Energy Agency* (IEA) (2025) mencatat bahwa emisi karbon dari sektor energi global pada 2024 meningkat

0,8% hingga mencapai sekitar 37,8 gigaton CO₂, menjadikannya sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan ini terutama dipicu oleh peningkatan emisi dari gas alam dan batu bara, dengan emisi batu bara global naik sekitar 0,9%. Di kawasan Asia Tenggara, konsumsi batu bara meningkat hampir 8% atau sekitar 25 juta ton, dengan kenaikan terbesar terjadi di Indonesia melalui penggunaan batu bara di industri metalurgi khususnya produksi nikel, serta Filipina dan Vietnam dari pembangkit listrik tenaga batu bara (IEA, 2025).



Gambar 1. 1 Sepuluh Negara dengan Emisi CO₂ Tertinggi dari Pembakaran Bahan Bakar Tahun 20 23

Sumber: International Energy Agency, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1, Indonesia menghasilkan emisi CO₂ sebesar 659,171 juta ton CO₂ dari pembakaran bahan bakar di sektor energi pada 2023, dengan kontribusi terbesar berasal dari penggunaan batubara yang menyumbang sekitar 53% dari total emisi CO₂. Berdasarkan emisi CO₂ dari pembakaran bahan bakar, Indonesia menempati peringkat ke-7 secara global dan peringkat ke-4 di kawasan Asia Pasifik. (IEA, 2026).

Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) paling lambat pada tahun 2060 melalui pengalihan ke penggunaan energi yang lebih bersih. Tingginya emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor energi, khususnya di Indonesia, menimbulkan tekanan bagi perusahaan untuk tidak hanya mengelola emisinya, tetapi juga mempertanggungjawabkan dampak lingkungan tersebut kepada publik dan para pemangku kepentingan. Meski menjadi penyumbang emisi karbon terbesar, sektor energi tetap berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi serta mendukung pertumbuhan ekonomi, industri, dan transportasi. Perubahan kondisi global akibat isu perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak emisi karbon, menerapkan strategi pengurangan emisi, serta mengungkapkan jejak karbon secara lebih transparan (Kartikasary dkk., 2023).

Dalam situasi seperti ini, perusahaan tidak cukup hanya berfokus pada upaya menekan emisi, tetapi juga perlu lebih terbuka dalam menyampaikan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya kepada para pemangku kepentingan (Ummah & Setiawan, 2021). Salah satu bentuk keterbukaan tersebut dilakukan melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*), karena laporan keberlanjutan mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi isu-isu yang material, termasuk emisi karbon, terutama bagi perusahaan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu lingkungan (Yasa & Sudana, 2025). Dalam hal ini, *carbon emission disclosure* (CED) dapat menjadi sarana bagi perusahaan

untuk menunjukkan tanggung jawab lingkungannya sekaligus merespons harapan publik terhadap komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan (Aini & Wilasittha, 2026).

Di Indonesia, pelaporan keberlanjutan diperkuat melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyusun serta menyampaikan laporan keberlanjutan setiap tahun bersamaan dengan laporan tahunan. Dalam laporan tersebut, perusahaan dapat mengungkapkan informasi terkait emisi karbon yang dikenal sebagai *carbon emission disclosure* (CED), yaitu penyampaian informasi emisi karbon perusahaan kepada publik sebagai bentuk komunikasi perusahaan dan pemenuhan kepentingan *stakeholder*, yang mencerminkan sejauh mana perusahaan menyampaikan informasi terkait perubahan iklim, perhitungan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, upaya dan biaya pengurangan emisi, serta pertanggungjawaban atas emisi karbon yang dihasilkan. (Widianingsih, 2025). Meskipun laporan keberlanjutan telah diwajibkan, pengungkapan emisi karbon di Indonesia pada praktiknya masih bersifat sukarela karena belum terdapat ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai informasi emisi karbon yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan masih memiliki keleluasaan dalam menentukan sejauh mana informasi emisi karbon akan disampaikan dalam laporan keberlanjutan. Akibatnya, keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai emisi karbon di Indonesia masih belum menunjukkan pola yang konsisten dan menyeluruh. Sebagian besar perusahaan

belum menerapkan mekanisme pencatatan serta pelaporan emisi yang memadai dan tidak sedikit perusahaan yang hanya memuat informasi terkait emisi secara umum dan terbatas, tanpa berpedoman pada kerangka pelaporan yang telah dikenal luas, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Carbon Disclosure Project* (CDP) (Fahira & Yuliandhari, 2025).



Gambar 1. 2 Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan data tingkat *carbon emission disclosure* pada 41 perusahaan sektor energi yang menjadi fokus penelitian ini sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2, rata-rata tingkat pengungkapan seluruh sampel yang diukur berdasarkan tujuh item dalam GRI 305 mengenai emisi menunjukkan angka 41% atau sekitar tiga dari tujuh item pada tahun 2021, 48% pada tahun 2022, 56% pada tahun 2023, hingga 63% atau setara empat hingga lima item pada tahun 2024. Meskipun terdapat peningkatan seiring dengan

meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim dan komitmen Indonesia dalam mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060, rata-rata pengungkapan yang hanya mencakup kurang dari lima dari tujuh item GRI 305 mencerminkan bahwa sebagian besar perusahaan sektor energi di Indonesia masih belum menyampaikan informasi emisi karbonnya secara menyeluruh.

Hal ini diperkuat oleh laporan lembaga riset energi dan iklim global, *Ember*, yang dikutip oleh RRI pada tahun 2024, yang mengungkapkan bahwa enam dari sepuluh perusahaan batubara terbesar di Indonesia, yaitu PT Berau Coal Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (kini PT Alamtri Resources Indonesia Tbk), PT Bayan Resources Tbk, PT Baramulti Suksessarana Tbk, dan PT ABM Investama Tbk, belum memasukkan emisi gas metana tambang (*coal mine methane/CMM*) dalam pelaporan emisi gas rumah kaca perusahaan. Kondisi ini menjadi perhatian karena *Ember* memperkirakan bahwa total emisi perusahaan batu bara dapat menjadi lebih dari dua kali lipat apabila emisi gas metana tambang turut diperhitungkan. Tidak diungkapkannya emisi tersebut berpotensi menyebabkan total emisi yang dilaporkan perusahaan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dan menunjukkan bahwa informasi yang diungkapkan dalam carbon emission disclosure masih berpotensi belum menggambarkan keseluruhan emisi yang dihasilkan perusahaan. (Marbeta, 2024).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua perusahaan merespon tuntutan transparansi emisi karbon secara merata, meskipun tekanan regulasi dan perhatian publik terhadap isu perubahan iklim terus meningkat.

Keterbukaan informasi emisi karbon pun menjadi semakin penting, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Keragaman tingkat pengungkapan yang masih cukup besar antarperusahaan ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *carbon emission disclosure*, baik yang berasal dari karakteristik internal perusahaan maupun tekanan dari pihak eksternal.

Salah satu tekanan yang berasal dari pihak eksternal yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi lingkungan adalah kepemilikan institusional. Hal ini dikarenakan investor institusional memiliki kepentingan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga keberadaannya dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam pengungkapan informasi lingkungan (A. E. Putri & Warnida, 2023). Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, dan institusi keuangan lainnya. Keberadaan investor institusional umumnya dipandang mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen, karena mereka memiliki kepentingan yang lebih besar untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab (Wahyuni dkk., 2025). Investor institusional membutuhkan informasi yang memadai untuk menilai risiko, keberlanjutan, dan prospek perusahaan dalam jangka panjang, sehingga mendorong manajemen untuk mengungkapkan emisi karbon secara lebih luas

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham institusional (Rahmawati dkk., 2024). Penelitian oleh Ghofur & Syafik (2025) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Namun, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang negatif terhadap *carbon emission disclosure*, menurut Yanto dkk. (2025). Wahyuningrum dkk. (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Di samping peran pemegang saham, susunan dewan perusahaan juga turut memengaruhi arah kebijakan dan tingkat keterbukaan informasi perusahaan. Keberagaman dewan atau *diversity of board* menunjukkan adanya perbedaan karakteristik di antara anggota dewan yang dapat memengaruhi proses pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan (Jeyhunov dkk., 2025). Perbedaan tersebut dapat terlihat dari berbagai sisi, seperti gender, usia, pendidikan, pengalaman, maupun asal negara anggota dewan. Salah satu bentuk yang paling sering dikaitkan dengan praktik tata kelola global adalah *foreign board*, yaitu keberadaan anggota dewan yang memiliki kewarganegaraan berbeda dari negara tempat perusahaan beroperasi (Rahmawati dkk., 2023). Kehadiran dewan asing dipandang dapat memperluas sudut pandang perusahaan karena mereka membawa pengalaman lintas negara, pemahaman terhadap standar internasional, serta kepekaan yang lebih tinggi terhadap isu keberlanjutan, termasuk keterbukaan informasi emisi karbon (Karunia & Rizkyana, 2026).

Foreign board juga dinilai mampu memperkuat kapasitas dewan dalam memahami risiko iklim dan menilai informasi yang perlu diungkapkan kepada publik, sehingga pelaporan emisi karbon yang dihasilkan cenderung lebih terukur dan selaras dengan ekspektasi investor maupun *stakeholder* global. Dalam penelitian ini, *diversity of board* difokuskan pada aspek *foreign board* mengingat keberadaan dewan asing dipandang membawa pengaruh yang signifikan terhadap praktik tata kelola dan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian Wahyuningrum dkk. (2025) dan Kiswanto dkk. (2026) *foreign board* ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Namun, Ariani dkk. (2023) menemukan bahwa *foreign board* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan terkait perubahan iklim, termasuk emisi karbon.

Selain itu, kondisi keuangan perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat *carbon emission disclosure*, yang salah satunya tercermin melalui tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya (Efendy dkk., 2023). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dinilai memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan pelaporan, termasuk penyediaan informasi terkait emisi karbon. Selain itu, perusahaan yang berkinerja baik secara finansial cenderung lebih termotivasi untuk menjaga legitimasinya di mata masyarakat dan investor, sehingga pengungkapan emisi karbon dapat berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus tanda bahwa perusahaan tersebut

berkomitmen terhadap keberlanjutan, selain mengejar keuntungan (Santoso dkk., 2024). Oleh karena itu, profitabilitas sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk mempublikasikan informasi emisi karbon secara lebih terbuka.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningrum dkk. (2024), dan Widyastuti dkk. (2023) pengungkapan emisi karbon dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat profitabilitas. Di sisi lain, Widianingsih (2025) menemukan bahwa, khususnya bagi perusahaan energi Indonesia, tingkat profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian, meskipun profitabilitas sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan, pengaruhnya tidak selalu muncul dengan arah yang sama.

Selain profitabilitas, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kewajiban yang dimiliki, yang tercermin melalui *leverage*. *Leverage* mengacu pada seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai asetnya (Marheni dkk., 2025). Semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar kewajiban perusahaan kepada kreditur, sehingga perusahaan cenderung lebih memprioritaskan pemenuhan kewajiban tersebut dibandingkan aktivitas lain yang bersifat sukarela (Syahdanti & Marietza, 2024). Dalam kaitannya dengan *carbon emission disclosure*, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung membatasi pengungkapan karena aktivitas tersebut membutuhkan biaya tambahan, baik dalam proses pengukuran maupun pelaporan emisi karbon (Subadriyah & Jannah, 2024). Di sisi lain, *leverage* juga dapat mendorong

perusahaan untuk meningkatkan keterbukaan informasi sebagai upaya menjaga kepercayaan kreditur dan stakeholder melalui transparansi yang lebih luas (Utari & Aprilina, 2023). Temuan Meiryani dkk. (2023) dan Yauri & Widianingsih (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*. Sementara Widianingsih (2025) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Selain mempertimbangkan aspek internal seperti kondisi keuangan, perusahaan juga perlu menunjukkan komitmennya terhadap transparansi lingkungan melalui penyampaian informasi kepada publik, salah satunya melalui *media exposure* (Yulianti & Waworuntu, 2025). *Media exposure* merupakan sarana komunikasi perusahaan melalui media untuk memublikasikan informasi agar aktivitasnya dapat diketahui oleh masyarakat luas (Nurjanah & Mulyandini, 2024). Media juga berperan sebagai sarana penyebaran informasi terkait aktivitas perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan (Syafik dkk., 2025). Akibatnya, perusahaan yang lebih sering menggunakan media cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon sebagai bentuk transparansi yang bertujuan untuk menjaga citra publik mereka. Sejumlah peneliti, termasuk Yauri & Widianingsih (2023) telah menemukan bahwa *Media exposure* memiliki dampak positif terhadap *carbon emission disclosure*. Namun, Meiryani dkk. (2023) menemukan bahwa *media exposure* justru berpengaruh negatif pada perusahaan LQ45. Sementara itu, penelitian Sulistyawati & Saputra (2025)

pada perusahaan pertambangan menunjukkan *media exposure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *carbon emission disclosure*.

Tekanan eksternal berkaitan erat dengan bagaimana publik menilai tindakan nyata perusahaan terhadap lingkungan, yang diukur melalui kinerja lingkungan. Sejauh mana suatu perusahaan mampu mengendalikan dampak operasinya terhadap lingkungan diukur melalui kinerja lingkungannya. (Desvita & Rahma, 2025). Kinerja lingkungan juga berkaitan dengan upaya perusahaan dalam mengelola, menjaga, dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan di sekitar kegiatan operasionalnya (Panjaitan dkk., 2026). Di Indonesia, upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan ini umumnya diukur melalui peringkat PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam penelitian oleh Yauri & Widianingsih (2023), dan Hidayat dkk. (2022) secara konsisten memberikan bukti empiris bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap luas *carbon emission disclosure*. Sebaliknya, Widianingsih (2025) menemukan bahwa pada perusahaan sektor energi, tingkat kinerja lingkungan tidak memberikan pengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi *carbon emission disclosure* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan, yang umumnya dapat dilihat dari total aset, total penjualan, atau nilai kapitalisasi pasar sekaligus mencerminkan jumlah sumber daya dan kekayaan yang dimiliki perusahaan (Panjaitan dkk., 2026). Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, seperti dana, teknologi,

dan tenaga ahli, sehingga lebih mampu menyusun pelaporan lingkungan secara lebih rinci dan terbuka (Panjaitan dkk., 2026). Selain itu, perusahaan besar juga cenderung mendapat perhatian dan tekanan yang lebih besar dari masyarakat serta *stakeholder*, karena aktivitas operasionalnya dinilai memiliki dampak lingkungan yang lebih luas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat dkk. (2022) serta Yauri & Widianingsih (2023), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *carbon emission disclosure* pada sektor manufaktur. Di sisi lain, Riantono & Sunarto (2022) menemukan bahwa tingkat keterbukaan informasi mengenai emisi karbon tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Wahyuningrum dkk. (2024) yang menguji faktor-faktor pendorong *carbon emission disclosure* (CED) dengan kinerja lingkungan sebagai variabel moderasi pada periode 2017–2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memoderasi hubungan kepemilikan institusional, *foreign board*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *carbon emission disclosure*, namun tidak memoderasi hubungan *media exposure*. Arah moderasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa kinerja lingkungan cenderung memperlemah pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap *carbon emission disclosure*. Selain itu, kinerja lingkungan juga terbukti berpengaruh langsung dan signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja lingkungan memiliki keterkaitan yang kuat dengan *carbon emission disclosure*. Mengingat hal-hal tersebut, penelitian ini mengkaji kinerja lingkungan sebagai variabel

independen guna menganalisis dampaknya secara langsung terhadap pengungkapan emisi karbon, khususnya di perusahaan sektor energi untuk periode tahun 2021–2024.

Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel ukuran perusahaan untuk memperluas cakupan analisis. Sejalan dengan Hidayat dkk. (2022), ukuran perusahaan dapat memengaruhi pengungkapan informasi terkait emisi karbon. Dalam penelitian tersebut, perusahaan yang berukuran lebih besar dinilai memiliki ketersediaan sumber daya yang lebih memadai untuk memenuhi biaya pengungkapan, serta menghadapi tekanan dan tuntutan yang lebih besar dari publik sehingga terdorong untuk menyampaikan informasi lingkungan secara lebih transparan. Selain itu, penggunaan perusahaan sektor energi sebagai subjek penelitian serta periode pengamatan 2021–2024 menjadi bentuk kebaruan lain yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Pemilihan perusahaan sektor energi dalam penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya emisi karbon yang masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil. Sektor energi merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar, baik secara global maupun di Indonesia, karena aktivitas operasionalnya sangat berkaitan dengan penggunaan batu bara, minyak, dan gas. Di Indonesia, tingginya konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik dan kebutuhan industri menunjukkan bahwa sektor energi masih memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan emisi karbon. Sektor energi merupakan topik penelitian yang relevan mengingat keadaan tersebut, terutama dalam

kaitannya dengan studi mengenai *carbon emission disclosure*. Selain berkontribusi besar terhadap emisi, sektor energi juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional dan mendukung aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan pada sektor ini menghadapi tuntutan yang lebih besar untuk tidak hanya mengelola dampak lingkungan dari kegiatan usahanya, tetapi juga mengungkapkan informasi emisi karbon secara lebih transparan kepada para pemangku kepentingan.

Sementara itu, pemilihan periode 2021–2024 didasarkan pada pertimbangan untuk memperoleh gambaran perkembangan data yang lebih terkini. Selain itu, periode tersebut juga berkaitan dengan kewajiban pelaporan keberlanjutan di Indonesia yang mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan diperjelas melalui SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021, yang mengatur bahwa penyusunan serta penyampaian Laporan Keberlanjutan untuk perusahaan publik mulai dilakukan untuk periode laporan tahun 2021. Surat edaran tersebut juga memberikan penegasan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan keuangan dan keberlanjutan, termasuk ketentuan mengenai bentuk, ruang lingkup, dan batas waktu penyampaiannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi emisi karbon pada perusahaan sektor energi masih perlu mendapat perhatian. Perbedaan tingkat pengungkapan antarperusahaan dapat menyebabkan informasi mengenai dampak dan tanggung jawab lingkungan perusahaan belum tersampaikan secara merata kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menilai sejauh mana perusahaan merespons dampak

lingkungan dari aktivitas operasionalnya serta menunjukkan bentuk akuntabilitasnya kepada publik. Keterbukaan yang belum merata juga dapat membatasi pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran yang memadai mengenai komitmen perusahaan terhadap pengelolaan emisi karbon. Kondisi inilah yang membuat *carbon emission disclosure* masih menjadi isu yang penting untuk dikaji, khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas penghasil emisi. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka penelitian ini disusun dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Diversity of Board*, Profitabilitas, *Leverage*, *Media Exposure*, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2024.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
2. Apakah *diversity of board* berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
5. Apakah *media exposure* berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
6. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *diversity of board* terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *media exposure* terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Toeritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang akuntansi lingkungan dan pelaporan keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Carbon Emission Disclosure* (CED), terutama pada perusahaan sektor energi di

Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait relevansi *Legitimacy Theory*, *Agency Theory*, dan *Upper Echelons Theory* dalam menjelaskan praktik pengungkapan emisi karbon perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu pengungkapan emisi karbon dan keberlanjutan perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah/Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan regulator dalam mengevaluasi praktik pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor energi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat *carbon emission disclosure* (CED)) sehingga dapat mendukung pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendorong keterbukaan informasi emisi karbon secara lebih konsisten dan komprehensif.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sektor energi sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas *carbon emission disclosure* (CED). Melalui hasil penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon, seperti kepemilikan institusional, *diversity of board*, profitabilitas, leverage, *media exposure*, kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan. Dengan demikian, perusahaan diharapkan dapat

lebih memperhatikan pentingnya keterbukaan informasi emisi karbon sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan dan upaya mewujudkan keberlanjutan perusahaan.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan, pelaporan keberlanjutan, dan *carbon emission disclosure* (CED). Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti yang tertarik pada isu keberlanjutan perusahaan dan pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.